

**ANALYSIS OF THE DEPENDENCY AND EFFICIENCY RATIOS
OF CATUR RAHAYU VILLAGE FROM 2020 TO 2022**

**ANALISIS RASIO KETERGANTUNGAN DAN EFESIENSI DESA
CATUR RAHAYU TAHUN 2020-2022**

M. Ihwanul Ihsan^{1)}*

Fitrini Mansur²⁾

Nela Safelia³⁾

1)Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2)&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: ihwan02dg@gmail.com¹⁾, fitrinimansur@unja.ac.id²⁾, nelasafelia@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

Financial ratio analysis of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is one of the parameters used to measure the financial management performance of a village. Financial performance analysis was conducted using dependency and efficiency ratio calculations to measure the financial performance of the Catur Rahayu Village Government for the 2020-2022 period. The type of research used is descriptive, using a qualitative and quantitative approach. The results of the study show that the dependency ratio with an average of >96.22% per year in the very high category indicates that Catur Rahayu Village is highly dependent on transfer funds from the local or provincial government. Meanwhile, the efficiency ratio of Catur Rahayu Village from 2020 to 2022 is classified as inefficient, with an average efficiency ratio of >96.86% per year. This indicates that the financial management of Catur Rahayu Village is not yet optimal in terms of exploring its potential to increase its own-source revenue and managing its expenditures efficiently.

Keywords: *Dependency Ratio, Efficiency Ratio, Catur Rahayu Village*

ABSTRAK

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan suatu desa. Analisis kinerja keuangan yang dilakukan menggunakan perhitungan rasio ketergantungan dan efisiensi guna mengukur kinerja keuangan Pemerintah Desa Catur Rahayu periode tahun 2020-2022. Jenis penelitian yang digunakan ialah deksriptif dengan memakai pendekatan secara kualitatif dan dengan pendekatan secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio ketergantungan dengan rerata >96,22% pertahunnya dengan kategori sangat tinggi menandakan bahwa Desa Catur Rahayu sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah daerah atau provinsi. Sedangkan rasio efisiensi Desa Catur Rahayu dari tahun 2020-2022 termasuk kriteria kurang efisien dengan rerata rasio efisiensi sebesar >96.86% pertahunnya. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Catur Rahayu belum optimal untuk menggali potensi yang ada agar PADes bertambah dan mengelola perbelanjaan secara baik agar semakin efisien.

Kata kunci: *Rasio Kertegantungan, Rasio Efisiensi, Desa Catur Rahayu*

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia ialah sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini merupakan sistem dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Noviati, 2013). Oleh karena itu, untuk melaksanakan pemerintahan yang demokratis maka pemerintah memberlakukan adanya otonomi daerah yang merupakan hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan desa yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan terampil tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Dengan ketentuan tersebut diharapkan suatu desa dapat berkembang dengan lebih baik dan optimal serta mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilakukan secara terbuka. Keterbukaan tersebut dapat dijalankan melalui Musyawarah Desa (Musdes) kemudian hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Pengelolaan APBDes yang diberikan pemerintah hendaknya dikelola sesuai dengan tujuan serta penerapan fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Berikut data keuangan Desa Catur Rahayu periode 2020-2022.

Uraian	TAHUN					
	2020		2021		2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan						
Pendapatan Asli Desa	0	0	781.216	781.216	0	0
Pendapatan Transfer	1.969.169.577	1.969.169.577	1.964.787.167	1.964.787.167	1.878.616.056	1.878.616.056
Pendapatan Lain-Lain	0	0	2.447.000	2.447.000	0	0
Jumlah Pendapatan	1.969.169.577	1.969.169.577	1.968.015.383	1.968.015.383	1.878.616.056	1.878.616.056
Belanja						
Jumlah Belanja	1.978.169.577	1.945.958.036	1.964.787.167	1.905.485.000	1.933.616.056	1.877.626.829
Surplus / (Defisit)	-9.000.000	23.211.541	3.228.216	62.530.383	-55.000.000	989.227
Pembiayaan						
Jumlah Pembiayaan	56.869.723	0	80.081.264	80.081.264	141.830.431	141.830.431

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan guna akuntabilitas dalam mewujudkan kinerja pemerintah (Siti Patonah et al., 2023). Pengukuran kinerja digunakan untuk membantu dalam mengelola serta memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja penting dilakukan, karena sebagai alat evaluasi laporan keuangan.

Dari hasil tersebut didapatkan data baik buruknya laporan keuangan sehingga dapat diketahui perkembangan keuangan dari masa ke masa. Evaluasi terhadap kinerja keuangan desa dapat dilakukan melalui analisis komparatif dari pencapaian kerja. Analisis komparatif dilakukan dari tahun ke tahun guna mengetahui tren perkembangan pengelolaan keuangan desa.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan mengenai kinerja keuangan desa ialah dengan melakukan analisis rasio keuangan (Ravelia et al., 2025). Setiap rasio memberikan indikasi cerminan terhadap dimensi yang berbeda dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis rasio penting dilakukan guna menilai sejauh mana Pemerintah Desa Catur Rahayu mampu mengelola APBDes secara efisien dan melihat rasio ketergantungan desa. Desa Catur Rahayu sendiri merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dengan beragam potensi UMKM yang memungkinkan dan dilihat dari jumlah penduduk sebesar 2.586 atau setara dengan 15,69% populasi penduduk di Kecamatan Dendang (Murtado, 2024). Oleh karena hal itu, penting dilakukannya evaluasi melalui pendekatan analisis rasio ketergantungan dan efisiensi di Desa Catur Rahayu.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengelolaan Keuangan Desa

Nurcholis (2011) menyatakan desa ialah lembaga asli pribumi yang memiliki hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat istiadat yang ada. Secara tidak langsung suatu desa memiliki kewenangan tersendiri guna melakukan pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan segala bentuk kegiatan administrasi yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan (Lestari et al., 2020). Tahapan akhir dari pengelolaan keuangan yakni dengan pertanggung jawaban terhadap siklus keluar masuknya dana yang terjadi atau uang dalam angka waktu tertentu. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yakni dimulai dari 1 Januari-31 Desember. Pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan beberapa asas yakni transparansi, akuntabel dan tertib, serta disiplin anggaran (Rivan et al., 2019). Hal ini dilakukan guna menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pasal 8 menjelaskan mengenai komponen dalam anggaran yang terdiri atas akun-akun yakni pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa yang dimaksud pada pasal 8 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh

desa (PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, 2014). Pengelolaan keuangan desa hendaknya ditinjau dengan baik. Peninjauan dilaksanakan melalui pengukuran kinerja.

2.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan suatu entitas dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks sektor publik, kinerja keuangan tidak hanya dinilai dari aspek pencapaian target keuangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Bastian, 2010; Mardiasmo, 2012).

Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa kinerja keuangan sektor publik mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola keuangan daerah melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran secara optimal. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan menjadi instrumen penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan serta akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa adalah analisis rasio keuangan. Analisis ini berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan, sehingga dapat menggambarkan kondisi kinerja keuangan desa secara lebih objektif (Putra, 2018). Rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, ketergantungan, dan pertumbuhan digunakan sebagai indikator kinerja keuangan desa yang bersumber dari data APBDes.

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan asli desa (Agustina, 2013), sedangkan rasio ketergantungan menunjukkan tingkat ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah pusat atau daerah (Mahmudi, 2019). Sementara itu, rasio efisiensi menilai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang direalisasikan, yang berkaitan erat dengan konsep produktivitas pengelolaan keuangan (Damayanti et al., 2021; Nasution, 2022)

Dengan demikian, kinerja keuangan desa dalam penelitian ini dipahami sebagai kesatuan variabel yang mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara mandiri, efektif, dan efisien, yang diukur melalui analisis rasio keuangan berdasarkan laporan APBDes

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan memakai

pendekatan secara kualitatif dan dengan pendekatan secara kuantitatif(Sugiyono, 2013). Populasi Penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Desa Catur Rahayu yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada periode tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah total sampling mengingat seluruh data laporan keuangan pada periode tersebut dianalisis secara menyeluruh. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara bersama stakeholder Desa Catur Rahayu, yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendaha Desa atau Kaur Keuangan. Pihak-pihak tersebut memiliki peran langsung dan krusial dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan Desa Catur Rahayu Periode tahun 2020-2022. Teknik yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengumpulan data oleh peneliti ialah mencakup kegiatan observasi, kegiatan wawancara serta dokumentasi. Analisa yang dipakai berupa analisa kualitatif agar mampu menjelaskan uraian dari perolehan hasil prosesperhitungan pada ketergantungan dan efesiensi. Adapun rasio yang digunakan peneliti ialah rasio ketergantungan dan efesiensi.

Rasio ketergantungan keuangan desa dirumsukan sebagai berikut :

$$\text{Ketergantungan Keuangan Desa} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100$$

Indikator penilaian yang digunakan dalam melihat Tingkat ketergantungan keuangan desa dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Persentase	Ketergantungan Keuangan Desa
0% - 10%	Sangat Rendah
10% – 20%	Rendah
20% – 30%	Cukup
30% – 40%	Sedang
40% – 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

(Rohman & Novian Resa, 2020)

Adapun rumus guna mengetahui efesiensi pengelolaan keuanag desa dirumsukan sebai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100 \%$$

Indikator penilaian dalam melihat Tingkat efesiensi pengelolaan keuangan desa disajikan dalam tabel berikut :

Persentase Kinerja (%)	Kriteria
<60%	Sangat efisien
60% - 80%	Efisien
80% - 90%	Cukup efisien
90% - 100%	Kurang efisien
>100%	Tidak efisien

(Susanto, 2019)

4. HASIL

Rasio ketergantungan desa menunjukkan sejauh mana desa bergantung pada dana transfer eksternal. Transfer eksternal ini dapat berasal dari pemerintah pusat atau daerah dalam membiayai kegiatan desa. Berikut rasio tabel ketergantungan keuangan Desa Catur Rahayu tahun 2020-2022.

Nama Desa	Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Desa (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)	Kriteria
Caturrahayu	2020	1.969.169.577	1.968.015.383	100,06	Sangat Tinggi
	2021	1.964.787.167	2.041.873.883	96,22	Sangat Tinggi
	2022	1.878.616.056	1.878.616.056	100,00	Sangat Tinggi

Merujuk pada (Rohman & Novian Resa, 2020), dilihat dari rasio ketergantungan yang di dapatkan oleh Desa Catur Rahayu yang >50% termasuk pada kriteria tinggi. Pasalnya Desa Catur Rahayu menggunakan dan bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan masih minimnya kemandirian dan bearnya ketergantungan Desa Catur Rahayu terhadap pempapatan transfer yang di peroleh dari pemerintah pusat atau provinsi. Adapun analisis efisiensi pengelolaan desa Catur Rahayu sebagai berikut:

Nama Desa	Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Desa (Rp)	Realisasi Pendapatan Desa (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Caturrahayu	2020	1.945.958.036	1.969.169.577	98,82	Kurang Efisien
	2021	1.905.485.000	1.968.015.383	96,82	Kurang Efisien
	2022	1.877.626.829	1.878.616.056	99,95	Kurang Efisien

Tabel di atas menunjukan kriteria dengan rasio efisiensi >90% dengan kriteria kurang efisien. Merujuk pada Susanto(2019) menjelaskan bahwa persentase yang didapatkan pada rasio efisiensi dengan angka 90-100% masuk kepada kriteria kurang efisien. Maka dari data keuangan periode 2020-2022 Desa Catur Rahayu belum efisien dalam mengelola keuangan secara baik dan optimal.

5. PEMBAHASAN

Analisis keuangan Desa Catur Rahayu pada periode 2020-2022 menunjukkan rasio ketergantungan di atas 96%, bahkan pada tahun 2020 persentasenya mencapai 100,06% yang dimana lebih tinggi dari kriteria yakni 50% dikategorikan sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Catur Rahayu nyarus seluruh dana keuangannya bergantung pada dana transfer pusat atau provinis, bukan pendapatan asli desa (PADes) atau sumber daya lokal. Faktanya bahwa sebagian besar penduduk desa tersebut merupakan petani sawit dengan kondiri alam yang rentan kemarau dan banjir serta bertanah gambut. Dengan lahan pertanian sawit yang besar, Desa Catur Rahayu di dalamnya terdapat perusahaan besar, namun belum memunculkan sumber PADes yang signifikan sehingga potensi ekonomi lokal belum termobilisasi secara optimal. Situasi ini dikhawatirkan apabila berkelanjutan maka dapat melemahkan kemandirian ekonomi desa.

Efisiensi pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui rasio belanja terhadap pendapatan pada Desa Catur Rahayu yang menunjukkan rasio efesiensi berada pada rerata 96-99,95% termasuk dalam kategori "kurang efesien". Data semacam ini mengindikasikan bahwa meskipun dana tersedia melalui transfer pemanfaatnya belum optimal. Ketergantungan fiskal yang tinggi pada Desa Catur Rahayu memiliki implikasi struktural jangka panjang. Berdasarkan analisis jika terus menerus bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsid apat melemahkan kemandirian desa karena belum mampu mengembangkan potensi lokal yang dapat meningkatkan PADes. Desa Catur Rahayu dengan dominasi masyarakatnya petani sawit, idelnya daerah tersebut dapat memanfaatkan lahan gambut dengan baik agar memiliki potensi meningkatkan PADes, selain itu potensi agribisnis, *agroforestry*, atau melakukan kemitraan dengan perusahaan guna meningkatkan PADes, Koperasi desa yang ada telah beberapa kali mengalami vakum, di karenakan pengelolaan yang kurang baik dari SDM nya, dan lainnya.

Hasil rasio ketergantungan serta efesiensi Desa Catur Rahatu seharusnya menjadi alaram penting guna mengelola keuangan desa perlu di arahkan ulang. Hal ini dapat dilakkan dengan strategi untuk mengidentifikasi potensi PADes dari pemanfaatan sumber daya lokal. Mengembalikan kembali koperasi menjadi salah satu solusi agar desa memiliki pemasukan secara mandiri. Desa yang bergantung pada tranfer tanpa mengembangkan kapasitas lokal rentan terhadap penurunan kinerja ekonomi ketika transfer berkurang. Untuk menjamin keberlanjutan ekonomi desa, perlu adanya sumber daya alam yang dapat dipergunakan. Adapun upaya lain dapat dilakukan ialah memperkuat kelembagaan ekonomi desa misalnya melalui koperasi, UMKM, kemitraan agribisnis.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Catur Rahayu masih ditandai tingginya rasio ketergantungan terhadap dana transfer, sehingga efisiensi belanja publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran secara tepat. Temuan ini memperkuat teori bahwa kemandirian fiskal desa tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan asli desa, tetapi juga kualitas tata kelola dan kapasitas aparatur dalam mengatur prioritas belanja. Secara praktis, desa perlu meningkatkan inovasi PADes dan memperkuat mekanisme evaluasi program agar belanja lebih efektif. Namun, penelitian ini terbatas karena hanya mengandalkan dokumen APBDes dan belum mengkaji faktor sosial-ekonomi serta partisipasi masyarakat, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel tersebut untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan mendukung peningkatan kinerja keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1.
- Annisaa, R. H., & Rizki, T. (2025). Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Earning Management pada Perbankan Syariah. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 319-329.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Damayanti, A., Suriyanto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), 654–666. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i3.1257>
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 88–94. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518>
- Lestari, D. D. A., Pertiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 1(9).
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Keuangan Dasar*. BPFE.
- Meilinda, T., Hartati, S., & Aprianti, S. (2025). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi, Ketergantungan Keuangan Daerah dan Utang pada Pendapatan Terhadap Keberlanjutan Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

- Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 8(1), 31–46.
<https://doi.org/10.31851/jmediasi.v8i1.19773>
- Murtado, M. (2024). Kecamatan Dendang Dalam Angka. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Vol. 13, Issue 2).
<https://doi.org/10.31503/madah.v13i2.534>
- NASUTION, H. J. (2022). Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia*, 24(3), 25–32.
<https://doi.org/10.51510/polimedia.v24i3.451>
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Nurcholis Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, Pub. L. No. 113, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014).
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers.
- Ravelia, V., Devy, T., & Nurani, K. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Pemerintahan Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. In *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* (Vol. 6, Issue 4).
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>
- Rivan, A., Ridwan Maksum, I., Kunci, K., Keuangan Desa, S., Desa, P., & Keuangan, M. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 2019.
<https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Rohman, F., & Novian Resa, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu). In *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 6, Issue 1). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Siti Patonah, I., Nilasari, Y., Patra Pertiwi, T., & Ekonomi, F. (2023). Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. *ASWAJA*, 4(2), 10–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.52188/ja.v4i02.480>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1).